Pemkot Makassar Kebut Asistensi DPA 2025

## Pemkot Makassar Kebut Asistensi DPA 2025

## ■ Dilaksanakan Seluruh OPD Sesuai Anggaran Dikelola

MAKASSAR, UPEKS—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengebut perampungan asistensi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025.

Asistensi tersebut dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pem kot Makassar.

"Sebagian besar OPD sudah menyelesaikan asistensi DPA. Jadi, penetapan DPA dilakukan dalam waktu yang tak lama la gi," kata A Zulkifly, Kepala Ba dan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Makassar, Senin (3/2/2025).

Zulkifly menjelaskan, perampungan asistensi DPA tersebut tergantung dari masing-masing OPD. Pasalnya, pendampingan asistensi dilakukan tiga OPD yang terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Makassar. Selain itu, pelaksanaan asis

tensi juga berdasarkan besaran anggaran yang dikelola OPD. OPD dengan anggaran yang besar tentunya membutuhkan waktu lebih lama dalam asistensi.

"Karena OPD dengan anggaran yang besar memiliki kompleksitas dalam asistensi DPA," katanya.

Dalam asistensi, katanya, se tiap rencana kerja OPD akan menjadi perhatian. Rencana kerja tersebut harus sesuai de ngan visi-misi Pemkot Makassar hingga sejalan dengan program strategis pemerintah pusat.

"Program kerja harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diatur," katanya.

Dimana, DPA ini nantinya akan memuat target pendapatan dan belanja setiap OPD. Dokumen ini juga akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dari setiap pengguna anggaran pada OPD lingkup Pemkot Makassar.

"Sejauh ini, penyelesaian asis tensi DPA sudah sekitar 80-90 OPD. Kita targetkan selesai ti dak lama lagi," katanya.

Tahun ini, Pemkot Makassar menerapkan program prioritas berupa kota rendah karbon atau Low Carbon City. Program sesuai dengan instruksi Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.

Penerapan program prioritas tersebut akan diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (2025) Kota Makassar sebesar Rp5,7 triliun.

Rincian APBD ini terdiri dari belanja Rp 5,7 triliun dan pendapatan daerah Rp 5,4 triliun. Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 2,4 triliun. (rul/hms)